

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) merupakan alat bukti bagi perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada serta digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Sejati. P.B & Prastiwi. A, 2015). Sedangkan, Menurut Aswani & Swami (2017), Pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) didefinisikan sebagai proses yang membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan – yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan perawatan lingkungan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/PJOK.03/2017, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mengukur dan mengungkapkan tanggung jawab perusahaan dari kinerja sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan untuk pembangunan keberlanjutan (Indriyani, D; Yuliandhari, 2020). Meskipun bentuk penerapan akuntansi ini telah ditangani secara khusus oleh sektor swasta, namun jika dibandingkan, penggunaannya oleh organisasi sektor publik masih kurang merata, dan hal ini dipandang sebagai bidang yang baru muncul (Ball, 2004). Namun demikian, dengan sekitar 40% dari seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh sektor publik, untuk itu diharapkan sektor publik dapat mulai melakukan laporan keberlanjutan, dengan memberikan

contoh dan melaporkan secara terbuka dan transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan (Ball & Grubnic, 2007). Sektor swasta mendominasi pengembangan agenda pelaporan keberlanjutan (Ball & Bebbington, 2008), dan beberapa pengamat menganggap bentuk pelaporan ini sebagai bagian dari pelaporan bisnis arus utama (Epstein, 2008). Sebagai perbandingan, pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tertinggal. Perbedaan tersebut telah meluas ke penelitian pelaporan keberlanjutan, yang secara historis diarahkan pada sektor swasta, dengan sedikit perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah (Ball, 2004). Dengan fokus pada pemerintah daerah, terdapat potensi yang lebih besar untuk pengembangan lebih lanjut konsep pembangunan berkelanjutan dan untuk mengembangkan agenda pembangunan keberlanjutan (Ball, 2007).

Pengawas dari International Financial Reporting Standards (IFRS) secara formal telah melakukan pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaporan keberlanjutan (termasuk komunitas investor dan penyusun laporan, bank sentral, regulator, pembuat kebijakan publik, firma, audit, dan penyedia jasa lainnya). Melalui pendekatan informal tersebut, menjadi jelas bahwa pelaporan keberlanjutan terus meningkat kepentingannya bagi para pemangku kepentingan tersebut. Terlepas dari perbedaan ruang lingkup dan motivasi, semua pemangku kepentingan memiliki pesan yang sama: ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pelaporan keberlanjutan. Seperangkat standar yang sebanding dan konsisten akan memungkinkan perusahaan untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi yang lebih besar atas inisiatif keberlanjutan mereka, yang akan sangat membantu investor dan khalayak yang lebih luas lagi dalam konteks dimana masyarakat menuntut adanya inisiatif untuk memerangi perubahan iklim.

Sebuah konsensus luas menyatakan bahwa praktik pengungkapan keberlanjutan saat ini tidak efisien dan terkadang tidak efektif karena kurangnya standar yang dapat diterima secara ini dan ketidakmampuan untuk membandingkan informasi yang dilaporkan atau memberikan jaminan.

Perusahaan-perusahaan juga tidak memiliki kejelasan tentang bagaimana mereka harus melaporkan dampak transisi perubahan iklim. Kekhawatiran juga muncul atas meningkatnya persyaratan peraturan regional dan domestik serta dampaknya terhadap daya saing global. Sektor korporasi juga telah membentuk banyak inisiatif mengenai pelaporan keberlanjutan. Standar Akuntansi IFRS menjawab tantangan ini dengan menyediakan seperangkat standar akuntansi berkualitas tinggi yang diakui secara internasional yang membawa transparansi, akuntabilitas dan efisiensi ke pasar keuangan (IFRS, 2020).

Dalam website resmi IFRS <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/> menjelaskan bahwa, International Sustainability Standards Boards (ISSB) menerbitkan IFRS 1 dan IFRS 2. Tujuan IFRS S1 adalah untuk mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya bagi entitas. Sedangkan tujuan IFRS S2 adalah untuk mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim yang berguna bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum dalam membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya bagi entitas.

Untuk tahun 2020 dan pertama kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*), ini merupakan upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat menjadi *role model* dalam melaporkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada lingkup tugasnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus berkomitmen mendukung TPB/SDGs sesuai dengan Peraturan Presiden No.59/2017 melalui kolaborasi dengan Akademisi, Pemerintah, DPR, dan pelibatan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pelaporan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap dapat menjadi organisasi yang menjadi teladan bagi institusi lainnya dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan serta mewujudkan peran aktif Badan

Pemeriksa Keuangan dalam aspek perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (BPKRI, 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam pelaporan *Sustainability Report*. Standar ini dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSBB) yang dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, termasuk kontribusinya -positif atau negatif- terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Standar ini dikembangkan terutama untuk digunakan dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Pemetaan topik material dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ketersediaan data yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan standar pengungkapan oleh GRI untuk *Sustainability Report* (BPKRI, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang juga telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Seiring dengan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, Badan Pemeriksa Keuangan menyelaraskan strategi pemeriksaan sekaligus menjalankan peran sebagai lembaga pemeriksa yang mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lebih dari itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut menjalankan kesepakatan INTOSAI mengenai empat pendekatan pemeriksaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu: (1) menilai kesiapan suatu negara dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) melakukan pemeriksaan program pemerintah yang memiliki aspek *Sustainable Development Goals* (SDGs); (3) menilai dan mendukung implementasi tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi role model transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi. (BPKRI, 2020).

Pemerintah daerah merupakan bidang sektor publik yang berpotensi menjadi pemeran utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Ball, 2004). Tanggung jawab dan fungsi pemerintah daerah sangat luas dan menyeluruh, namun berbasis pada tingkat masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya Keputusan yang diambil pada tingkat pemerintah daerah secara langsung mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mempunyai posisi utama untuk mendorong dan melaksanakan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) (Williams dkk, 2011). Berdasarkan sumber dari <https://iap2.or.id/sustainability>, Isu mengenai laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) semakin gencar dan menjadi hal penting untuk diimplementasikan bagi seluruh perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah daerah. Disamping itu juga isu keberlanjutan ini menjadi tujuan penting dalam Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti melihat bahwa implementasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) terhadap sektor publik tidak pernah dilakukan selama ini, walaupun Badan Pemeriksa Keuangan melakukannya ditahun 2020 tidak diikuti oleh lembaga dan pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Belinda Williams, Trevor Wilmshurst dan Robert Clift, 2011.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan “Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Jayapura)” untuk melihat pemahaman pemerintah daerah mengenai laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang begitu penting bagi terciptanya peran pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura pernah mendengar, melihat dan/atau membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)?
2. Apakah pemerintah daerah Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)?
3. Bagaimana pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Jayapura terkait dengan bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura pernah mendengar, melihat dan/atau membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).
2. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).
3. Untuk mengetahui pemahaman bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang akan disusun oleh pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

a. Aspek Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Aspek Praktis

Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta menjadi pengetahuan tambahan mengenai Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi serta dapat meningkatkan Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi tentang landasan teori, peneliti terdahulu, serta model penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian. penelitian, jenis data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan instrument penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, deskripsi karakteristik responden, dan hasil penelitian